

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Di negara berkembang, termasuk Indonesia perencanaan pembangunan mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan secara lebih cepat dan terarah.¹ Ada beberapa hal yang menjadi alasan utama tentang besarnya peranan perencanaan pembangunan yang diterapkan di negara berkembang, khususnya di Indonesia.² Dalam perencanaan pembangunan yang cepat dan terarah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu: Pertama, sebagai suatu proses perumusan rencana pembangunan, dan kedua, sebagai substansi rencana pembangunan itu sendiri. Proses perumusan rencana pembangunan berkaitan dengan aktivitas bagaimana sebuah perencanaan pembangunan disusun, kapan dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut. Sedangkan secara substansi, rencana pembangunan

¹ "Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong untuk mendorong proses pembangunan lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Harendhika Lukiswara (2016).

² 1) Karena adanya ketidak pastian masa yang akan datang sehingga perlu disusun perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi kemungkinan situasi buruk yang mungkin timbul dikemudian hari berikut tindakan dan kebijakan yang preventif yang perlu dilakukan sebelumnya. 2) Untuk dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik terhadap para pelaku pembangunan baik dikalangan pemerintah swasta maupun masyarakat secara keseluruhan sehingga dalam jangka panjang akan terwujud proses pembangunan yang terpadu dan saling menunjang satu sama lainnya. 3. Karena mekanisme pasar belum berjalan secara sempurna, maka kondisi masyarakat banyak yang masih

berbicara mengenai apa isi dari rencana pembangunan yang telah disusun, permasalahan pokok dan isu-isu strategis yang mendesak untuk diselesaikan sesuai dengan tujuan pembangunan secara nasional.³ Menariknya tidak hanya satu komponen, tetapi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan khususnya di Indonesia ada banyak komponen dan substansi yang dilibatkan. Maksudnya disini adalah siapa saja unsur yang berpartisipasi dalam proses pencapaian target rencana pembangunan.⁴

Adapun unsur/aktor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dari dalam adalah para pemimpin atau elit pemerintah dan juga masyarakat atau elit lokal pimpinan dari suatu wilayah atau negara, seperti Presiden/wakil, para gubernur, bupati, walikota, DPR atau DPRD, LSM maupun tokoh adat atau kepentingan lain. Ditingkat lokal atau daerah para gubernur, bupati, walikota, para pengusaha, kelompok elit, DPRD semua itu adalah aktor yang berpengaruh dalam memainkan perencanaan pembangunan.⁵

³ Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia. Dapat dilihat dari Agenda Pembangunan Nasional RPJMN (2015-2019).

⁴ Unsur yang berpartisipasi dalam melancarkan rencana pembangan adalah Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat, Pihak swasta, pihak peneliti dan pengembangan daerah semua warga atau kelompok dalam masyarakat pada dasarnya berhak untuk berperan didalamnya agar dapat mengungkapkan permasalahan dan kebutuhan mereka. Kemungkinan yang muncul ddari perencanaan seperti itu adanya masyarakat yang tidak mau mendukung an tidak mau berpartisipasi dalam suatu program atau kegiatan pembngunan .Ali Kabul Mahi dan Sri Indra trigunarso (2017).

⁵ Warjio, PH. D. 2016. Politik Pembangunan: Paradok, Teori, Aktor & Ideologi. Medan: Kencana. hal. 36

Dalam hal ini, membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pemerintah pusat tetapi dari pemerintah daerah ikut mengambil bagian dalam urusan wajib untuk melancarkan pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya masing-masing secara mandiri sesuai dengan peraturan otonomi daerah tentang urusan pemerintah.⁶ Dari uraian tersebut, dapat diartikan bahwa rencana pembangunan yang banyak diterapkan di negara berkembang bukanlah perencanaan secara terpusat (*central plan*) sebagaimana yang pernah dilakukan di negara-negara sosialis dan komunis, seperti Rusia dan Cina.⁷

Diharapkan dari kenyataan tersebut, seluruh lapisan masyarakat perlu diajak berperan serta atau berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang

⁶ Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah urusan perencanaan pembangunan dalam pasal 150 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara tegas menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif efisien dan bersasaran serta menjamin tercapainya tujuan negara, maka ditetapkan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional). Ricky Wirawan, dkk (2015). Kemudian, UU pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 (ayat 5) tentang urusan pemerintah: Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

⁷ Sepanjang sejarah Rusia, masa pemerintahan Boris Yeltsin dikenang sebagai sebuah masa yang dilematis dan dramatis. Setelah sekian lama berada dalam pemerintahan yang bersifat otoriter dan totaliter yang dimulai dari masa pemerintahan Tsar hingga Komunis, akhirnya Rusia bertransformasi dengan wajah yang baru. Phita Crystalia Pramestiwi dkk (2014). Sedangkan pembangunan di Cina, mirip dengan strategi yang dilaksanakan oleh Uni Soviet: alat-alat produksi dinasionalisasi sebagai milik negara, perencanaan komando terpusat, pembangunan industri-industri berat, perlindungan keamanan tanpa hak-hak politik buruh dan petani, penindasan terhadap level konsumsi buruh dan petani untuk memaksimalkan potensi kelebihan ekonomi, dan konversi kelebihan ekonomi ke dalam investasi tingkat tinggi di bidang manufaktur, dan industri. Dengan jumlah populasi petani yang sangat besar, kolektivisasi pertanian pedesaan menjadi komponen sentral pembangunan Cina. Republik rakyat (2017)

lebih optimal.⁸ Kemudian dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan masing-masing mempunyai orientasi yang berbeda dalam proses pencapaian target pembangunan yang dapat di lihat berdasarkan model rencana pembangunan yang biasa digunakan oleh pemerintah daerah.⁹ Kemudian, sistem pembangunan Nasional di Indonesia mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu (1) Pendekatan politik, (2) Pendekatan teknokratik, (3) Pendekatan partisipatif, (4) Pendekatan atas-bawah (*top-down*), dan (5) Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).

Beberapa pendekatan yang ditawarkan dalam perencanaan pembangunan bertujuan untuk mempermudah para pelaku pembangunan untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing.¹⁰ Namun, pendekatan pembangunan

⁸ Optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

⁹ Secara umum (Berry :1973 dalam Karsasmita 1996) mengidentifikasi empat model perencanaan pembangunan yaitu 1) *Ameliorative problem-solving*, yaitu perencanaan yang disusun berdasarkan permasalahan yang ada, dan cenderung hanya berorientasi pada jangka pendek.2) *Allocative trend-modifying*, yaitu perencanaan yang lebih berorientasi ke masa depan dan disusun berdasarkan kecenderungan saat ini untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa yang akan datang. 3) *Exploitive opportunity-seeking*, yaitu perencanaan yang sama sekali tidak mengidentifikasi permasalahan dimasa yang akan datang melainkan langsung melihat peluang-peluang baru yang muncul. Dalam model ini baik masyarakat maupun swasta menjadi pelaku utama dalam sektor khususnya sektor ekonomi, selain itu model ini cenderung bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan sedikit kali memperhatikan masa depan. *Normative goal oriented planning*, yaitu perencanaan berorientasi ke masa depan dan mengidentifikasi tujuan-tujuan jangka panjang dan Negara. Model ini kemungkinan digunakan pada Negara-negara yang berbenuk sentralisti. Ali Kabul Mahi dan Sri Indra Trigunarjo (2017)

¹⁰ Lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan: (1) Poses politik, yaitu Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk visi, misi dan program yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah terpilih selama kampanye (2) Proses teknokratik, yaitu Perencanaan yang dilakukan oleh precana yang professional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan (3) proses partisipatif; yaitu perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) antara lain

yang dilaksanakan seringkali tidak berhasil karena pendekatan pembangunan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pembangunan tidak disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi dalam masyarakat. Kasus rencana pembangunan tersebut dijelaskan dalam penelitian Adriani Ginting dkk (2016), oleh Harendhika Lukiswara (2016) dan Azis Muslim (2016)

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai perencanaan pembangunan daerah, daerah Kab. Kep. Mentawai merupakan salah satu daerah otonom yang melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Faktanya dalam proses pelaksanaan program perencanaan pembangunan di daerah Kab. Kep. Mentawai masih belum terealisasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan, karena melihat beberapa visi/misi perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen program RPJMD. Visi yang ditetapkan adalah terwujudnya masyarakat kepulauan mentawai yang maju, sejahtera dan berkualitas. Selanjutnya, misi yang ditetapkan terdiri dari lima butir, meliputi: (1) Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis berbasis sosial budaya, (2) mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, (3) mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkualitas, (4) mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berdaya saing, bercirikan wilayah kepulauan

melalui pelaksanaan musrembang (4) atas-bawah (*top-down*), yaitu semua keputusan dan kebijakan pembangunan yang penting semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan (5) bawah-atas (*bottom-up*), yaitu pada Proses ini pemerintah daerah mempunyai peranan yang cukup penting di samping kewenangan pemerintah pusat. Ali Kabul Mahi dan Sri Indra Trigunarso (2018)

dan berbasis kerakyatan, dan (5) mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.¹¹

Dalam peraturan daerah Kab. Kep. Mentawai telah disampaikan mengenai visi/misi kepala daerah yang terdapat dalam dokumen RPJMD, yaitu Mewujudkan SDM dan pembangunan infastrukur. Namun misi tersebut belum berjalan dengan optimal, terbukti dari hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten kepulauan Mentawai pada Tahun 2011-2016. Indikasinya dapat dilihat dari masih banyaknya infrastruktur fisik dan fasilitas sarana prasarana pendukung lainnya yang belum selesai secara tuntas. Dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan mengenai visi/misi Kepala daerah yang terdapat dalam dokumen RPJMD untuk meningkatkan SDM dan Infrastruktur seringkali terjadi ketimpangan, karena kebijakan prencanaan pembangunan lebih didominasi oleh eleit politik dan pemerintah Kab. Kep. Mentawai

Fenomena ini dapat memengaruhi alokasi pembiayaan belanja pembangunan daerah pada penyusunan APBD perubahan tidak bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui kondisi pembangunan infrastruktur di daerah Kab. Kep. Mentawai yang berlokasikan di bagian Sipora Utara dapat dilihat dalam tabel Infrastruktur Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai.

¹¹ Marhan, Tesis: 'Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2011-2016' Universitas Gadjah Madah, 2015. hal. 5

**Tabel 1. 1 Infrastruktur Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi
Kabupaten Kepulauan Mentawai**

No	Kecamatan	Panjang jalan	Kondisi Jalan (KM)		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4		
1	Sipora Utara	46,2	5,7	6,8	33,7

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012

Dari Tabel 1.1 tersebut dapat diartikan bahwa kondisi infrastruktur bagian jalan masih dalam kondisi kurang baik, dan masih sangat dibutuhkan perbaikan perluasan juga perhatian dari pemerintah daerah Kab. Kep. Mentawai. Tidak hanya itu, kantor-kantor yang dibangun, juga gedung sekolah, gedung rumah sakit tenaga SDM untuk mengelola semua itu masih sangat terbatas.

Memang sejauh ini pembangunan di daerah Kab. Kep. Mentawai yang ditangani adalah pembangunan fisik. Namun ketersediaan dan fungsi SDM dalam mengelola semua itu masih sangat terbatas dan masih kurang mendapatkan perhatian. Hal tersebut menunjukkan bahwa para politikus lokal belum memiliki perspektif pembangunan lain karena lebih fokus pada pembangunan fisik. Di lihat dari fenomena tersebut keterbatasan Sumber Daya Manusia di daerah Kab. Kep. Mentawai untuk mengisi ruangan dari beberapa gedung dan kantor yang telah dibangun oleh pemerintah daerah Kab. Kep. Mentawai memang harus menjadi perhatian.

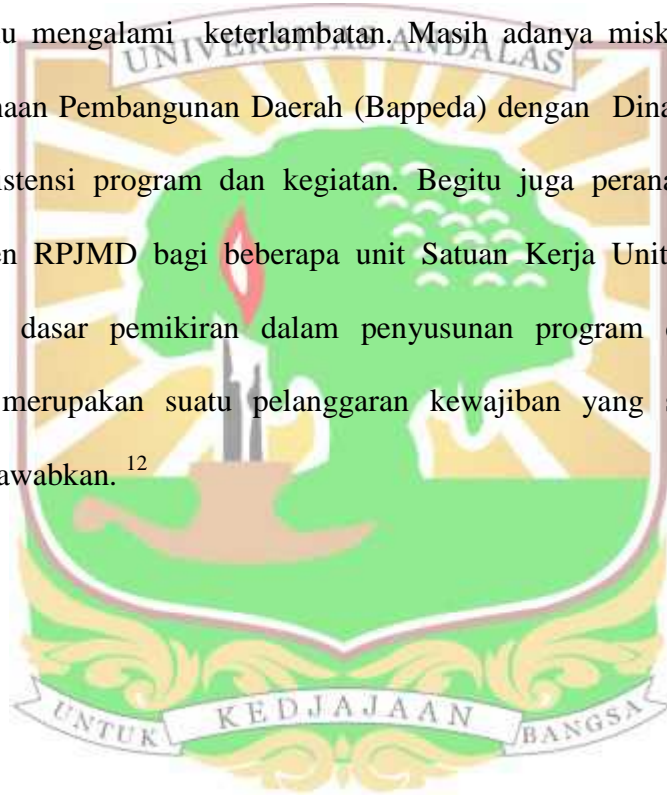
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai

Level Pendidikan	Jumlah Pendidikan	Persentase
Tidak/belum sekolah	9.176	13,03
Tidak Tamat SD	27.438	38,96
Tamat SD	18.829	26,74
Tamat SLTP	6.652	9,45
Tamat SMA	6.461	9,16
D I/D II	736	1,05
D III	205	0,29
Sarjana (S1, S2 dan S3)	931	1,32
Total	70.428	100,00

Sumber : BPS Kab. Kep. Mentawai Tahun 2015

Keterbatasan SDM di daerah Kab. Kep. Mentawai dipengaruhi oleh masih minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, kemudian sulitnya juga bagi masyarakat untuk menjangkau pusat atau lokasi tempat menempuh pendidikan yang dipengaruhi oleh keterbatasan transportasi. Kendala lainnya adalah kondisi ekonomi yang tidak mendukung dan kebiasaan masyarakat yang nyaman hidup di alam sehingga sulit menyesuaikan diri untuk lebih tertarik dengan dunia pendidikan. Dengan terbatasnya SDM yang dipengaruhi oleh minimnya pendidikan, tentu dalam hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat daerah Kab. Kep. Mentawai untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan RPJMD di daerah Kab. Kep. Mentawai.

Berdasarkan fenomena RPJMD di daerah Kab. Kep. Mentawai tersebut memang masih banyak mengalami kendala. Adanya unsur-unsur dari Visi/Misi yang merupakan indikator untuk mengarahkan penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Namun, perkembangan pembangunan sejauh ini khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, masih belum berjalan dengan optimal. Setiap penyusunan rencana kerja pembangunan daerah yang dilakukan rutin tiap tahun selalu mengalami keterlambatan. Masih adanya miskomunikasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Dinas-dinas pada saat pelaksanaan asistensi program dan kegiatan. Begitu juga peranan penting untuk sebuah dokumen RPJMD bagi beberapa unit Satuan Kerja Unit Daerah (SKPD) belum menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan program dan kegiatannya. Fenomena ini merupakan suatu pelanggaran kewajiban yang seharusnya dapat dipertanggung jawabkan.¹²



¹² *Op.Cit.* Marhan. hal. 6

1.2 Rumusan Masalah

Rencana pembangunan di daerah Kab. Kep. Mentawai sudah dimulai sejak Tahun 1999. Pemerintah daerah Kab. Kep. Mentawai sudah menjalankan beberapa proyek pembangunan. Namun, rencana pembangunan pada waktu itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat daerah Kab. Kep. Mentawai mengenai peningkatan kualitas hidup, karena fokus pembangunan hanya mengarah pada pembangunan fisik.¹³ Walaupun pembangunan kantor-kantor rumah sakit dan infrastruktur itu baru bisa dikatakan melimpah, namun ide-ide bagi pendekatan mengenai cara peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masih sangat minim, masalah disektor kritis seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan ekonomi nyaris tidak diurusi.

Bupati Yudas Sabaggalet juga menyampaikan tentang masih kurangnya SDM di daerah Kab. Kep. Mentawai, berikut penjelannya :

Saat ini 23 persen penduduk belum mengenyam pendidikan atau tidak tamat SD. "Kami ingin penduduk Mentawai dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik agar dapat membangun daerah."¹⁴

Besarnya potensi SDA yang dimiliki, tentunya menjadi modal yang sangat berharga untuk menjadikan daerah Kab. Kep. Mentawai dan masyarakat bisa maju dan sejahtera. Namun yang menjadi kendala dalam pengelolaan SDA di mentawai adalah adanya keterbatasan SDM yang secara garis besar dipengaruhi oleh masalah minimnya pendidikan.

¹³ Fasilitas-fasilitas fisik di antaranya: Infrastruktur, sekolah, pusat kesehatan, kantor polisi, Kemudian rencana pembangunan selanjutnya adalah rencana pembangunan mengenai peningkatan kantor-kantor pemerintah daerah Mentawai dan jaringan telekomunikasi Henk Schulte dkk(2007)

¹⁴Ireneparamita "Ingin Memajukan SDM, Kepulauan Mentawai Gandeng UB" <https://prasetya.ub.ac.id/berita/Ingin-Majukan-SDM-Kepulauan-Mentawai>" Diakses pada 9 Juni 2017.

Tabel 1.4 Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Pendapatan, 2017

Pendapatan	Targeet (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
I Pendapatan Asli Daerah	84 811 094 059,82	68 477 676 598,42	80,74
1 Pajak Daerah	3 920 000 000,00	2 647 327 991,00	67,53
2 Retribusi Daerah	14 671 310 539,39	10 515 993 799,00	71,68
3 Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	17 696 354 870,98	15 177 376 110,00	85,77
4 Lain-lain PAD yang sah	48 523 428 649,45	40 136 978 698	82,72
II Dana Perimbangan	745 948 952 000,00	731 385 235 582,00	98,05
1 Bagi Hasil Pajak	20 415 072 000,00	20 700 614 259,00	101,40
2 Dana Alokasi Umum	591 339 690 000,00	591 339 690 000,00	100,00
3 Dana Alokasi Khusus	134 194 190 000,00	119 344 931 323,00	88,93
III Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	119 411 839 783,00	731 385 235 582,00	98,05
1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	29 164 488 783,00	29 498 586 119,00	101,15
2 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	46 812 952 000,00	46 812 952 000,00	100,00
3 Bantuan Keuangan dari Provinsi	1 815 000 000,00		
4 Dana Desa	41 619 399 000,00	41 619 399 000,00	100,00
Jumlah Pendapatan	950 171 885 842,82	917 793 849 299,42	96,59

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017

Gambaran realitas SDM di daerah Kab. Kep. Mentawai menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah pendidikan yang belum sepenuhnya dienyam oleh seluruh masyarakat daerah Kab. Kep Mentawai khususnya pendidikan Sekolah Dasar Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa 78,73 persen (BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012) masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai belum berhasil menikmati pendidikan dasar secara keseluruhan. Sebagian besar masyarakat yang belum menikmati pendidikan dasar secara keseluruhan berada dalam kategori masyarakat yang tidak menamatkan Sekolah Dasar (SD) dan tidak sekolah yakni sebesar 51,99 persen dari keseluruhan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Perencanaan RPJMD di daerah Kab. Kep. Mentawai memang perlahan sebagian terus mengalami perkembangan yang tidak pernah lepas dari berbagai kendala dan tantangan. Kemudian dipandang dari sisi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki saat ini, dapat dikatakan belum memenuhi kebutuhan layaknya sebuah daerah otonomi dalam pengelolaan pemerintah secara utuh. Jumlah SDM di daerah Kab. Kep. Mentawai dapat dilihat melalui Tabel Indeks Pembangunan (IPM).

Table 1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepulauan Mentawai	56,10	56,33	56,73	57,41	58,27	59,25

Sumber: BPS Kab. Kep. Mentawai 2015

Dari Tabel 1.2 tersebut, dapat diartikan bahwa SDM di daerah Kab. Kep. Mentawai memang mengalami peningkatan tiap Tahunnya, namun peningkatan SDM

tersebut tidak meningkat secara pesat dan belum mencapai target seperti yang diharapkan, khususnya tenaga SDM yang berfungsi atau yang berperan untuk mengelola fasilitas atau pun terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan perencanaan pembangunan di daerah Kab. Kep. Mentawai.

Dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah Kab. Kep. Mentawai tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor.¹⁵ Pada Tahun 2012 IPM daerah Kab. Kep. Mentawai berjumlah sekitar 56,10 % dan mengalami kenaikan di Tahun 2013 sekitar 56,73% yang dipengaruhi oleh faktor peningkatan pendidikan. Di Tahun 2014 IPM daerah Kab. Kep. Mentawai kembali meningkat 56,73% dikarenakan adanya penambahan pendapatan dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada Tahun 2015, 2016 dan 2017 IPM Kab. Kep. Mentawai mengalami kenaikan dari 57,41% dan 58,27% hingga 59,25% karena dipengaruhi oleh faktor pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan dan pendidikan sudah mulai berkurang karena sudah adanya pemasukan dana pemerintah melalui peningkatan aktivitas pertumbuhan ekonomi.

Dari Tabel 1.2 tersebut dapat diartikan bahwa IPM di daerah Kab. Kep. Mentawai sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah disebutkan. Keberhasilan rencana RPJMD di daerah Kab. Kep. Mentawai sudah dijelaskan melalui data IPM, mengalami masalah dan tantangan khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pembangunan

¹⁵ Beberapa faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya: Tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan. (David Rahmat dkk, Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat)

infrastruktur, terjadi perbedaan pemikiran dan sulitnya untuk menyatukan hati antara pemerintah daerah Kab. Kep. Mentawai dengan masyarakat daerah Kab. Kep. Mentawai selama proses perencanaan pembangunan dilaksanakan. Di sisi lain boleh melaksanakan pembangunan tetapi di sisi lainnya harus tetap mempertahankan budaya dan suku asli daerah Kab. Kep. Mentawai seperti yang diungkapkan oleh Marwan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) :

Mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan keberadaan suku asli Mentawai yang masih hidup harmonis di perdalaman. Ia menilai, pembangunan besar-besaran tidak seharusnya mengusik tataan kearifan lokal yang sudah terbangun selama ratusan tahun.”Jika telah menjadi daerah modern, tentunya tidak boleh meninggalkan ciri khas daerah. Sebab itu yang membedakan Mentawai dengan daerah lain.¹⁶

Pembangunan Infrastruktur adalah kunci utama untuk memajukan daerah Kab. Kep. Mentawai, seperti trans daerah Kab. Kep. Mentawai, jika itu selesai akses transportasi darat di daerah Kab. Kep. Mentawai akan mudah untuk dilalui, sehingga ekonomi kemasyarakatan akan turut tumbuh. Hal itulah yang menandakan pembangunan Infrastruktur di Mentawai memang sangat dibutuhkan.¹⁷ Berdasarkan fenomena perencanaan pembangunan di bagian SDM dan Infrastruktur peneliti memperhatikan bahwa memang ada kebijakan dari pemerintah daerah Kab. Kep.

16

Septo, Andika Candra “Pembangunan Infrastruktur Mentawai Mendesak” <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/22/ov38xb428-pembangunan-infrastruktur-mentawai-mendesak>.
Diterbitkan 22 Aug 2017 20:17 WIB

¹⁷Perencanaan pembangunan di daerah Mentawai sangat penting sebagai penggerak kemajuan. Seperti yang di sampaikan oleh Nasrul dalam tulisan M. Noli Hendara. Yang berjudul: Infrastruktur Kunci Kemajuan Mentawai. “Nasrul berpendapat. Mentawai akan menjadi sebuah daerah yang bersinar dengan aktivitas wisata dunia pada masa yang akan datang. Bahkan Mentawai juga akan menjadi daya tarik pertumbuhan ekonomi wilayah Brat Sumatera. Namun tentunya untuk mewujudkan hal tersebut infra struktur perlu segera di bangun.

Mentawai yang tidak berjalan sesuai dengan visi/misi yang terdapat dalam dokumen program RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Daerah RPJMD daerah Kab. Kep. Mentawai No. 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Kep. Mentawai Tahun 2011-2016, pasal 4 ayat (2b) mengatur visi/misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu, 1) mewujudkan SDM yang cerdas, sehat, dan berkualitas, 2) Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan berwawasan lingkungan. Dari visi/misi tersebut menandakan bahwa kebutuhan infrastruktur sangat penting apa lagi secara topografi, permukaan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai bervariasi antara dataran, sungai, dan berbukit-bukit, rata-rata ketinggian daerah seluruh ibukota kecamatan dari permukaan laut (DPL) adalah 2 meter. Kemudian visi/misi mengenai perencanaan pembangunan di bagian peningkatan SDM dan infrastruktur diperkuat kembali oleh Bupati Kab.Kep. Mentawai. Setelah dilantik sebagai Bupati Mentawai periode 2017-2022 oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno belum lama ini, Yudas Sabaggalet menyatakan komitmen meningkatkan sumber daya manusia dan memperluas pembangunan infrastruktur di daerah itu.

kunci meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat setempat, terutama melalui SDM yang andal didukung infrastruktur daerah yang memadai."Saya tidak akan berhenti menyekolahkan putra-putri Mentawai hingga perguruan tinggi. Itu adalah komitmen," kata Yudas usai dilantik sebagai bupati.¹⁸

¹⁸ Miko Elfisha, "Memajukan Mentawai dengan Pembangunan Infrastruktur dan SDM" (<https://sumbar.antaranews.com/berita/204800/memajukan-mentawai-dengan-pembangunan-infrastruktur-dan-sdm>) Diterbitkan: Sabtu, 27 Mei 2017 9:16 WIB

Dari pembahasan mengenai SDM tersebut, sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, namun masyarakat Kab. Kep. Mentawai belum dikatakan sudah merasakan kesejahteraan, karena sesuai data masyarakat Kab. Kep. Mentawai masih termasuk salah daerah kabupaten termiskin, seperti yang diungkapkan oleh Gotomo Bayu Haji:

Menurut Gutomo, mengutip draf PP-P2K LIPI, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten termiskin di wilayah Provinsi Sumatera Barat (BPS, 2014). Tingkat kemiskinannya mencapai sekitar 15 persen (13.265 jiwa), jauh di atas angka kemiskinan nasional yang sekitar 11 persen. Sebagian besar penduduknya hanya memiliki pendidikan setingkat sekolah dasar dengan rata-rata lama sekolah sekitar 6 tahun, tidak memiliki pelayanan kesehatan masyarakat yang baik atau sangat buruk dan angka harapan hidup yang relatif rendah yaitu sekitar 63,55 (2014).¹⁹

Kemiskinan dan ketidaksejahteraan masyarakat daerah Kab. Kep. Mentawai tersebut dipengaruhi oleh tindakan eksploitasi SDA selama 40 Tahun, hal ini juga diungkapkan oleh Gotomo Bayu Haji:

Pemerintah menyerahkan hampir seluruh kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada badan hukum usaha, dalam bentuk koperasi (IPK), PT HPH, dan PT perkebunan sejak tahun 1969, wilayah ini kemudian dieksploitasi sumber daya alamnya selama 40 tahun, namun eksploitasi itu tidak menjadikan masyarakat sejahtera,” kata Gutomo Bayu Aji, peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI dalam acara Semiloka Pengelolaan Berkelanjutan Ekosistem Kepulauan Mentawai yang diselenggarakan Pemprov Sumbar dan Yayasan Citra Mandiri Mentawai, 23 Mei lalu.

¹⁹ Setapak “Mentawai Masih Jadi Kabupaten Termiskin” <https://programsetapak.org/mentawai-masih-jadi-kabupaten-termiskin/>. Diterbitkan : Tanggal : 17 Juli 2016

Tabel 1.6 Indikasi Perencanaan RPJMD di daerah Kab. Kep. Mentawai

NO	KONDISI RIIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KAB. KEP. MENTAWAI
1.	Adanya visi/misi perencanaan sesuai dengan peraturan daerah Kab.Kep. Mentawai No. 7 Tahun 2012, pasal 4 ayat (2b) mengenai peningkatan pembangunan SDM dan pembanguan infrastruktur yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kab. Kep. Mentawai yang belum berjalan sesuai dengan harapan.
2	Masih adanya mis komunikasi antara Bappeda dengan Dinas-dinas pada saat pelaksanaan asistensi program dan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah Kab. Kep. Mentawai
3	Tidak adanya kesatuan hati antara pemerintah daerah dengan masyarakat daerah Kab. Kep. Mentawai dalam melaksanakan perencanaan pembangunan RPJMD
4	Minimnya SDM sangat mempengaruhi pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat Kab.Kep. Mentawai untuk ikut terlibat atau berpartisipasi secara langsung dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan, baik dalam hal pengelolaan SDA, pengelolaan fasilitas infrastruktur, dan dalam menjalankan fungsi untuk menyelesaikan laporan keuangan dan menyelesaikan laporan mengenai pelaksanaan program atau pun kinerja dalam dokumen RPJMD, serta terlibat dalam kegiatan Musrenbang.
5	Masih adanya janji dan komitmen yang disampaikan oleh Bupati Yudas Sabaggalet mengenai peningkatan SDM dan peningaktan pembangunan infrastruktur yang terddapat dalam dokumen RPJMD dalam pencapaian hasilnya tidak sesuai dengan data dan belum adanya kejelasan mengenai program seperti apa yang dilaksanakan oleh Bupati Yudas Sabaggalet dalam menyelesaikan masalah SDM dan masalah pembanguan infrastruktur dengan masyarakat daerah Kab.Kep. Mentawai selama periode kepemimpinannya dari tahun 2012-2017.
6	Dengan adanya tantangan geografis, dimana masyarakat daerah Kab. Kep. Mentawai di hubungkan antar pulau satu dengan pulau lainnya, dan juga masih terbatasnya infrastruktur, transportasi laut maupun darat hal itulah yang membuat masyarakat Kab.Kep. Mentawai sulit untuk menuju pusat atau

lokasi pendidikan.

- 7 Penyelesaian lahan tanah milik dari masyarakat dan hutan tempat tinggal dari masyarakat daerah. Kab. Mentawai banyak dieksploitasi dan penyelesaian masalah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan.
- 8 Masyarakat Kab. Kep. Mentawai belum mengalami kesejahteraan dan Tingkat Kemiskinan masih tinggi dan mengalami eksploitasi alam selama 40 Tahun lamanya
- 9 Masih adanya pembangunan bagian infrastruktur yang masih kurang diperhatikan seperti jalan yang menghubungkan daerah bagian pelosok dengan kota mentawai (Tuapejat), infrastruktur bagian seperti listrik, tower, dan transportasi yang menghubungkan masyarakat juga masih minim .

Sumber :Diolah oleh peneliti Tahun 2019

Berdasarkan fakta persoalan perencanaan RPJMD bahwa Visi/Misi Kepala Daerah masih belum terlaksana sesuai dengan harapan. Dalam perenanaan pembangunan di daerah Kab. Kep. Mentawai masih kurangnya saling koordinasi dan masih sering terjadi miskominakasi antara dinas dengan dinas lainnya maupun dengan masyarakat. Masih adanya ketimpangan kebijakan pembangunan mengenai visi/misi kepalah daerah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kab. Kep. Mentawa yang dijadikan sebagai kepentingan politik, masih adanya sengketa lahan/tanah milik masyarakat yang akan dijadikan lahan untuk membangun infrastruktur sampai sekarang tidak diselesaikan dengan kesepakatan. Perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur yang mengalami kendala, di mana masyarakat daerah Kab. Kep. Mentawai saling bertentangan dan tidak punya kesatuan hati baik dari pihak masyarakat daerah Kab.Kep. Mentawai maupun dari pemerintah daerah Kab. Kep. Menawai itu sendiri. Jadi, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan

masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Bagaimana persoalan perencanaan pembangunan RPJMD di daerah Kab.Kep. Mentawai pada Tahun 2012-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menjelaskan: Mengidentifikasi dan menjelaskan persoalan perencanaan RPJMD Kab. Kep. Mentawai tahun 2012-2016

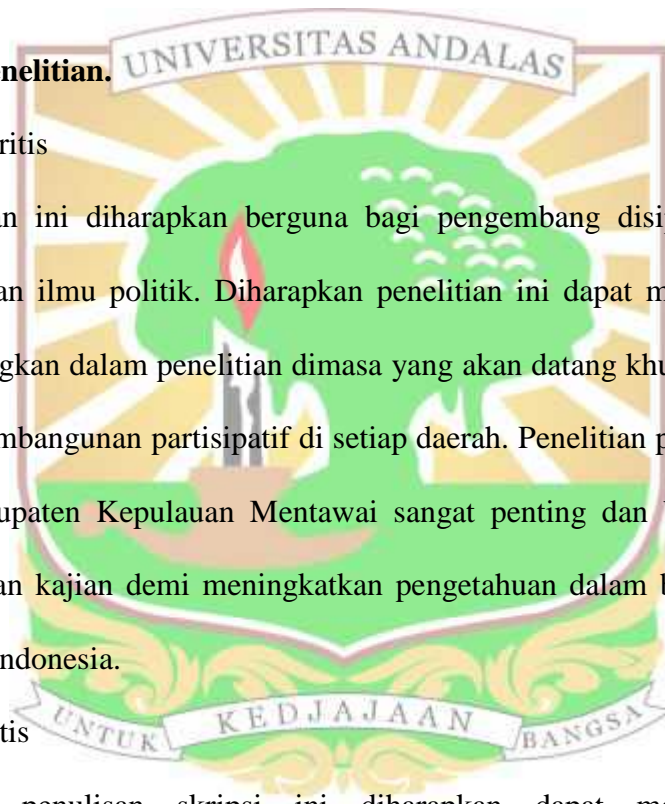
1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembang disiplin ilmu terkait, terkhusus jurusan ilmu politik. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan dapat dikembangkan dalam penelitian dimasa yang akan datang khususnya fenomena perencanaan pembangunan partisipatif di setiap daerah. Penelitian perencanaan RPJMD di Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat penting dan bermanfaat untuk menambah bahan kajian demi meningkatkan pengetahuan dalam bidang mengenai Ilmu Politik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang politik sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. Dikarenakan setiap para penulis kemungkinan besar khususnya dalam bidang ilmu politik kajian yang digunakan sebagai bahan acuan sangatlah berbeda mengenai keunikan dan kebaruan dari setiap hasil yang diteliti,



untuk itulah secara praktis penelitian ini menjadi sangat penting menambah bahan kajian para penulis dan semakin memperluas wawasan.

